

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2017

Oleh :

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU



Disampaikan pada : RAKORENBANGHUTDA PROVINSI RIAU TAHUN 2016

Pekanbaru, 3 Maret 2016

ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN KEHUTANAN TAHUN 2017

1. Semangat pembangunan kehutanan adalah memperbaiki kondisi tapak hutan menjadi lebih baik. Masalah di tingkat tapak, perlu diberikan intervensi (regulasi dan anggaran) sehingga perbaikan kinerja senantiasa diikuti perbaikan di tingkat tapak.
2. Implementasi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu **Kesepahaman desain kelembagaan perangkat daerah** dan **Kesepahaman pelaksanaan pengalihan P3D**, dan dilakukan pemetaan urusan pemerintahan, penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran.



ARAHAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM PROVINSI RIAU TAHUN 2017

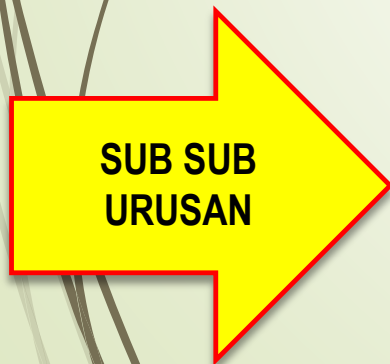
- 1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2017) : Pemantapan infrastruktur dan aparatur pemerintahan dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya**
- 2. Penyesuaian terhadap UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.**
- 3. Menghindari pelaksanaan pembangunan yang bukan kewenangan pemerintah provinsi**
- 4. Mengakomodir kegiatan baru yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi**
- 5. Identifikasi program/kegiatan strategis daerah (pariwisata berbasis budaya, koordinasi supervisi KPK, penanganan karhutla, dll)**



PEMETAAN URUSAN KEHUTANAN

(Lampiran : BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan)

TINGKATAN	SUB URUSAN	SUB SUB URUSAN	KETERANGAN
PUSAT	6	20	
PROVINSI	4	14	(Kecuali Perencanaan Hutan & Pengawasan Kehutanan)
KAB/KOTA	1	1	Pengelolaan Tahura Kab/Kota



Pusat

20

Provinsi

14

Kab/Kota

1

Urusan Bidang Kehutanan

6 Sub Urusan

1. Perencanaan Hutan (**Urusan Pusat**)

2. Pengelolaan Hutan

3. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

4. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan

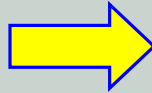
5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

6. Pengawasan Kehutanan (**Urusan Pusat**)

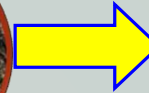
PERMASALAHAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU



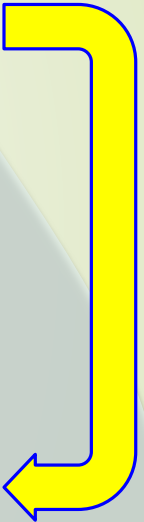
Illegal Logging



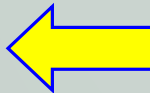
Perambahan Hutan



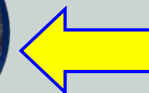
Konflik Tenurial



Lahan Kritis.



Kebakaran Hutan



Penguasaan Lahan

Catatan : Kegiatan tersebut terjadi tidak hanya pada kawasan hutan produksi, bahkan telah merambah pada kawasan hutan lindung & hutan suaka alam.



UPAYA PENYELESAIAN MASALAH



Penyelesaian RTRW Prov. Riau
sebagai Acuan Pemanfaatan Ruang
di Provinsi Riau



Pembangunan Posko Pencegahan
Perambahan & Penanggulangan
Kebakaran Hutan



Percepatan Penataan Batas
Kawasan Hutan & Areal Kerja
Izin Kehutanan



Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak
dalam suatu Unit Manajemen



Moratorium Izin Penebangan Hutan
Alam & Izin Baru



Program Rehabilitasi Hutan &
Lahan serta Perhutanan Sosial

AGENDA UTAMA PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2017

- 1. Pariwisata Berbasis Budaya dan Berorientasi Daya Saing**
- 2. Industrialisasi Potensi Lokal (UMKM)**
- 3. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**
- 4. Ketahanan Pangan**
- 5. Peningkatan Aksestabilitas Sumber Daya Air dan Sanitasi**
- 6. Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Daratan dan Pesisir**

PROYEKSI CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2017

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM TAHUN 2017
Program Optimalisasi Peran Badan Usaha Bidang Kehutanan dalam Pembangunan	Meningkatnya peran badan usaha bidang kehutanan dalam pembangunan (unit)	Meningkatnya peran badan usaha bidang kehutanan dalam pembangunan (55 unit)
Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Meningkatnya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan (unit)	Meningkatnya pembinaan, penertiban pengolahan dan informasi harga pasar hasil hutan bukan kayu, serta penyediaan data awal potensi bahan baku pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m ³ /tahun (33 unit).
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan produksi (unit)	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan produksi dan hutan lindung, rekomendasi pemanfaatan hutan sesuai fungsi dan kondisi fisik hutan (74 unit)
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Tertanganinya tindak pidana kerusakan kawasan hutan (kasus)	Tertanganinya tindak pidana kerusakan hutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, Penyiapan database tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, pengelolaan dan pemanfaatan taman Hutan Raya, ekosistem penting dan daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Hutan (55 kasus)
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan kehutanan yang dikembangkan	Meningkatnya sarana dan prasarana, kapasitas SDM dan kelembagaan penyuluhan kehutanan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi (23 Unit)
Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan	Tersusunnya skenario pengelolaan kawasan hutan (judul)	Tersusunnya tata kelola hutan, penyediaan data penataan batas dan peta rencana tata hutan produksi dan hutan lindung, rencana pembentukan KPHP dan KPHL serta progres kemajuannya, Neraca Sumber Daya Hutan dan statistik kehutanan, informasi peluang investasi di areal KPHP dan KPHL (32 judul)
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Meningkatnya pemulihan kerusakan hutan dan lahan, melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha)	Meningkatnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pemulihan kerusakan hutan dan lahan kritis, data potensi calon lokasi pengembangan Hutan rakyat, Rehabilitasi DAS serta Konservasi Tanah dan Air (761,773 Ha)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Usaha ekonomi masyarakat miskin (Kelompok)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Usaha ekonomi masyarakat dan Petani Hutan, Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan (5 Kelompok)
Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa sekitar hutan (desa)	Meningkatnya intensifikasi dan pengembangan aneka Usaha Kehutanan serta Perhutanan Sosial di masyarakat desa sekitar hutan (12 desa)

USULAN PENDANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017 (PROVINSI & KAB/KOTA)

No	SKPD/KABUPATEN/ KOTA	SUMBER & JUMLAH ANGGARAN / (Rp)					
		APBN				APBD I	TOTAL
		APBN I	DEKON	DAK	TP/PHLN		
1	DISHUT PROVINSI RIAU		17.380.000.000	26.136.000.000		126.906.271.500	170.422.271.500
2	SETBAKORLUH	-	-	-	-	1.950.000.000	1.950.000.000
3	INDRAGIRI HILIR	-	-	-	-	7.393.108.136	7.393.108.136
4	ROKAN HILIR	-	-	2.000.000.000	-	2.950.000.000	4.950.000.000
5	PEKANBARU	-	-	390.000.000	-	1.446.486.036	1.836.486.036
6	INDRAGIRI HULU	-	-	-	-	1.077.535.000	1.077.535.000
7	KAMPAR	-	-	2.000.000.000	-	12.375.000.000	14.375.000.000
8	SIAK	-	-	-	-	11.750.000.000	11.750.000.000
9	ROKAN HULU						-
10	KUANTAN SINGINGI						-
11	BENGKALIS					1.004.950.000	1.004.950.000
12	DUMAI						-
13	PELALAWAN					2.508.000.000	2.508.000.000
14	KE. MERANTI						-
15	KPHP TEBING TINGGI						-
16	KPHP KAMPAR KIRI	9.911.054.777	-	1.000.000.000	-	5.594.888.000	16.505.942.777
17	KPHL KUANSING SELATAN						-
	Jumlah	9.911.054.777	17.380.000.000	31.526.000.000	-	174.956.238.672	233.773.293.449

USULAN PENDANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017 (UPT KEMEN LHK)

No	UPT LINGKUP KEHUTANAN	SUMBER & JUMLAH ANGGARAN / (Rp)						
		APBN				APBD I	APBD II	TOTAL
		APBN I	DEKON	DAK	TP/ PHLN			
1	BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH	16.011.114.000	-	-	-	-	-	16.011.114.000
2	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WIL. XIX	11.492.154.000	-	-	-	-	-	11.492.154.000
3	BALAI PENGELOLAAN DAS INDRAGIRI ROKAN	3.391.702.000	-	-	-	-	-	3.391.702.000
4	BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI SERAT TANAMAN HUTAN	14.390.813.000	-	-	-	-	-	14.390.813.000
5	BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III PEKANBARU	47.524.206.000	-	-	-	-	-	47.524.206.000
6	PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SUMATERA	-	-	-	-	-	-	-
7	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BBKSDA) RIAU	40.034.000.000	-	-	-	-	-	40.034.000.000
8	BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO	11.000.000.000	-	-	-	-	-	11.000.000.000
9	BALAI DIKLAT KEHUTANAN PEEKANBARU	-						-
10	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU	14.149.000.000						14.149.000.000
9	BALAI PENGELOLAAN DAS INDRAGIRI ROKAN	3.391.702.000						3.391.702.000
	Jumlah	161.384.691.000	-	-	-	-	-	161.384.691.000

BASIS DATA

DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI RIAU**

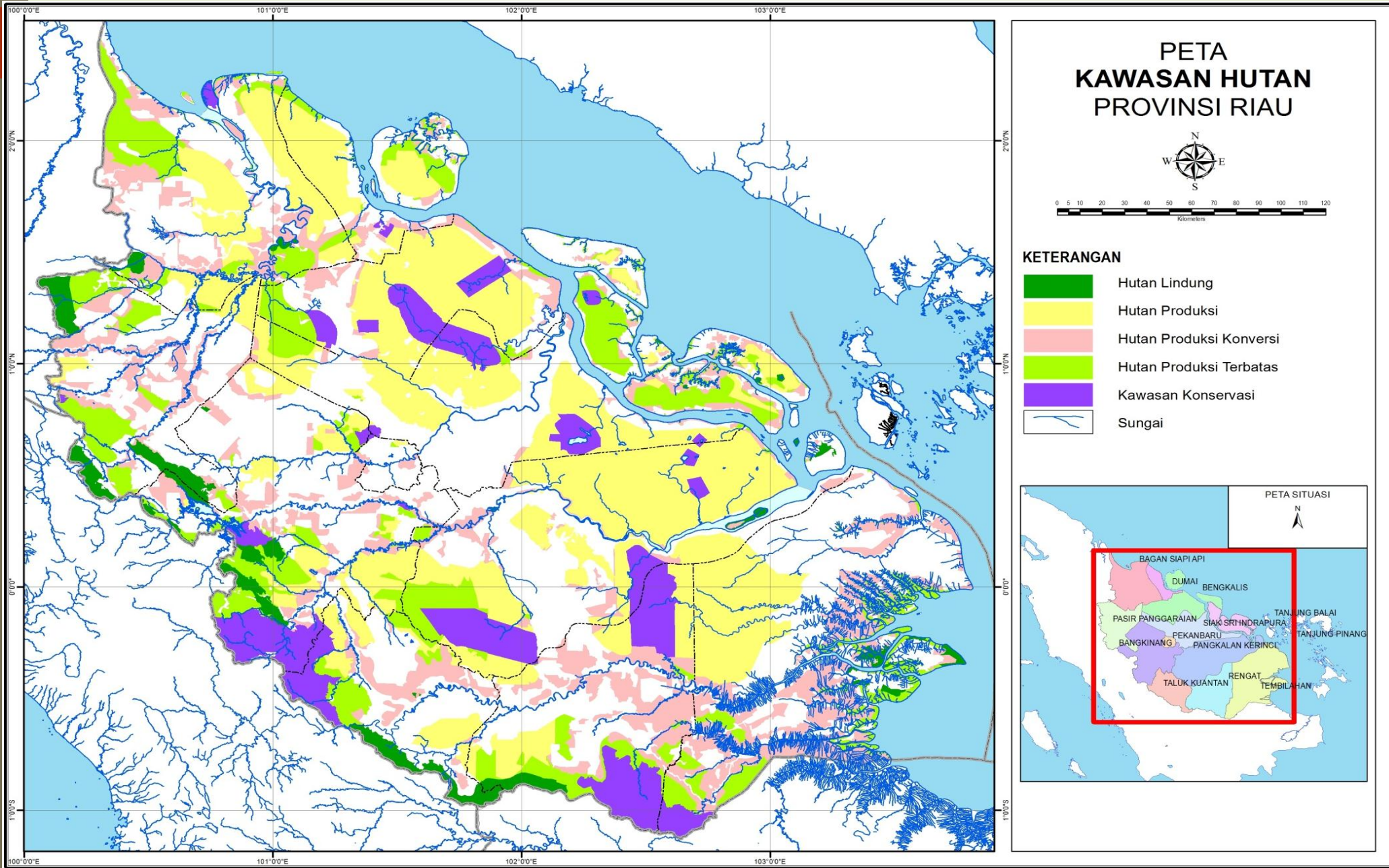
KONDISI UMUM KEHUTANAN PROVINSI RIAU

- **Dasar : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014, berdasarkan fungsinya, kawasan hutan Provinsi Riau terdiri dari perairan, areal penggunaan lain, hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan hutan suaka alam/hutan pelestarian alam.**
- **Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau $\pm$ 5.499.693 ha (60,97%) dari Luas Daratan Provinsi Riau.**

LUAS KAWASAN HUTAN & NON KEHUTANAN PROVINSI RIAU

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	%
A. Kawasan Hutan			
1	Hutan Konservasi (HK)	633,420	7.02
2	Hutan Lindung (HL)	234,015	2.59
3	Hutan Produksi (HP)	2,331,891	25.85
4	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1,031,600	11.44
5	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	1,268,767	14.07
Jumlah (A)		5,499,693	60.97
B. Non Kehutanan			
6	Areal Penggunaan Lain (APL)	3,400,416	37.70
7	Tubuh Air	120,123	1.33
Jumlah (B)		3,520,539	39.03
Total (A + B)		9,020,232	100.00
Sumber : SK.878/Menhut-III/2014 & Analisis SIG, 2014			

PETA KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU



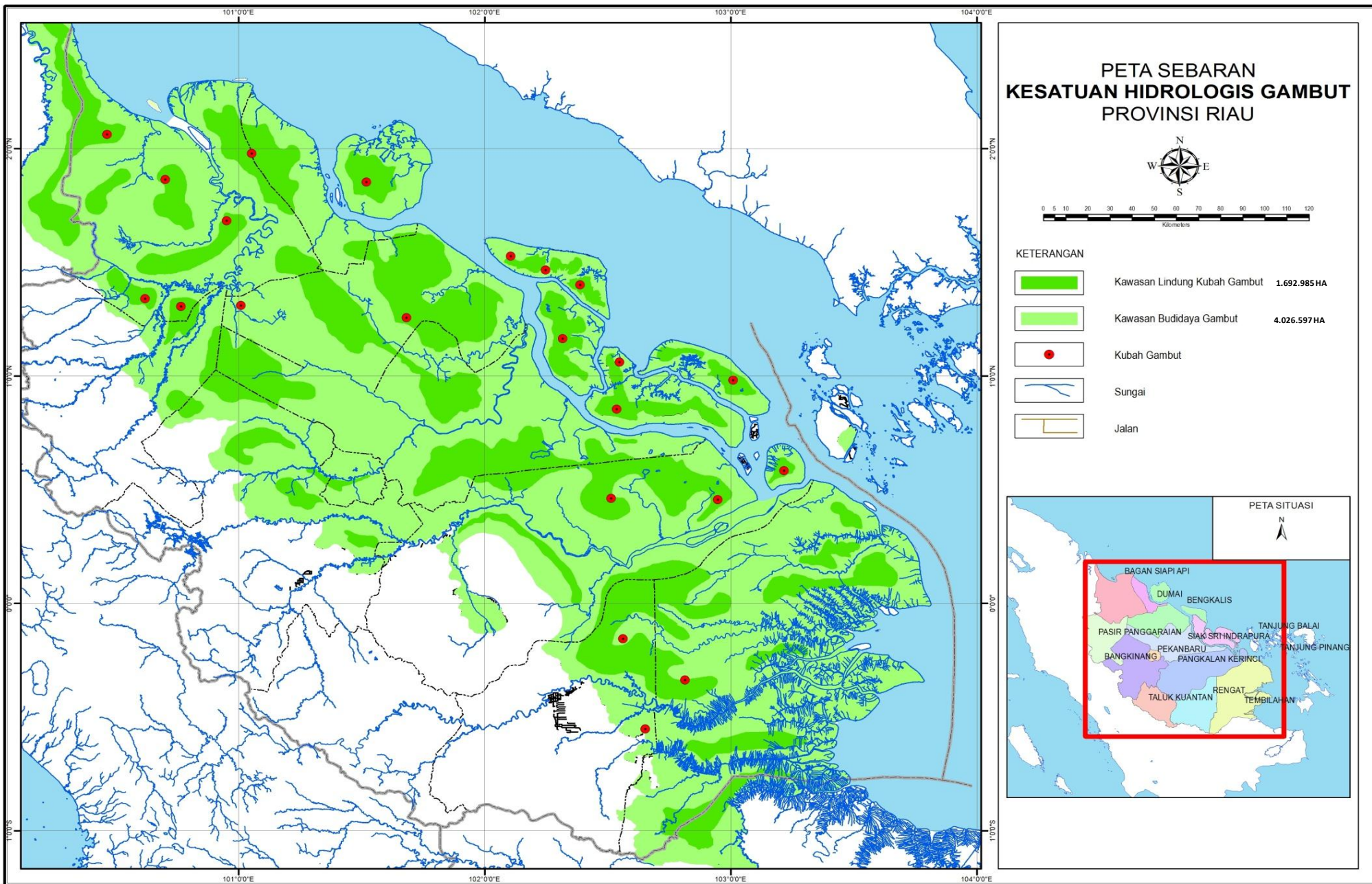
LUASAN KESATUAN HIDROLOGI GAMBUT (KHG) DI PROVINSI RIAU

NO	KABUPATEN / KOTA	KLG (ha)	KBG (ha)	KHG (ha)
1	BENGKALIS	344.956	534.693	879.649
2	INDRAGIRI HILIR	222.706	1.044.531	1.267.237
3	INDRAGIRI HULU	107.938	117.697	225.635
4	KAMPAR	15.924	137.887	153.811
5	PELALAWAN	234.088	670.373	904.461
6	ROKAN HILIR	263.032	471.018	734.050
7	ROKAN HULU	19.607	98.036	117.643
8	SIAK	231.990	503.845	735.835
9	DUMAI	123.317	175.204	298.521
10	PEKANBARU	-	42.266	42.266
12	KEPULAUAN MERANTI *)	129.427	231.047	360.474
TOTAL		1.692.985	4.026.597	5.719.582

SUMBER : MASTERPLAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI RIAU TAHUN 2010

Keterangan :

*) Dipisahkan dari Kab. Bengkalis berdasarkan Analisis GIS



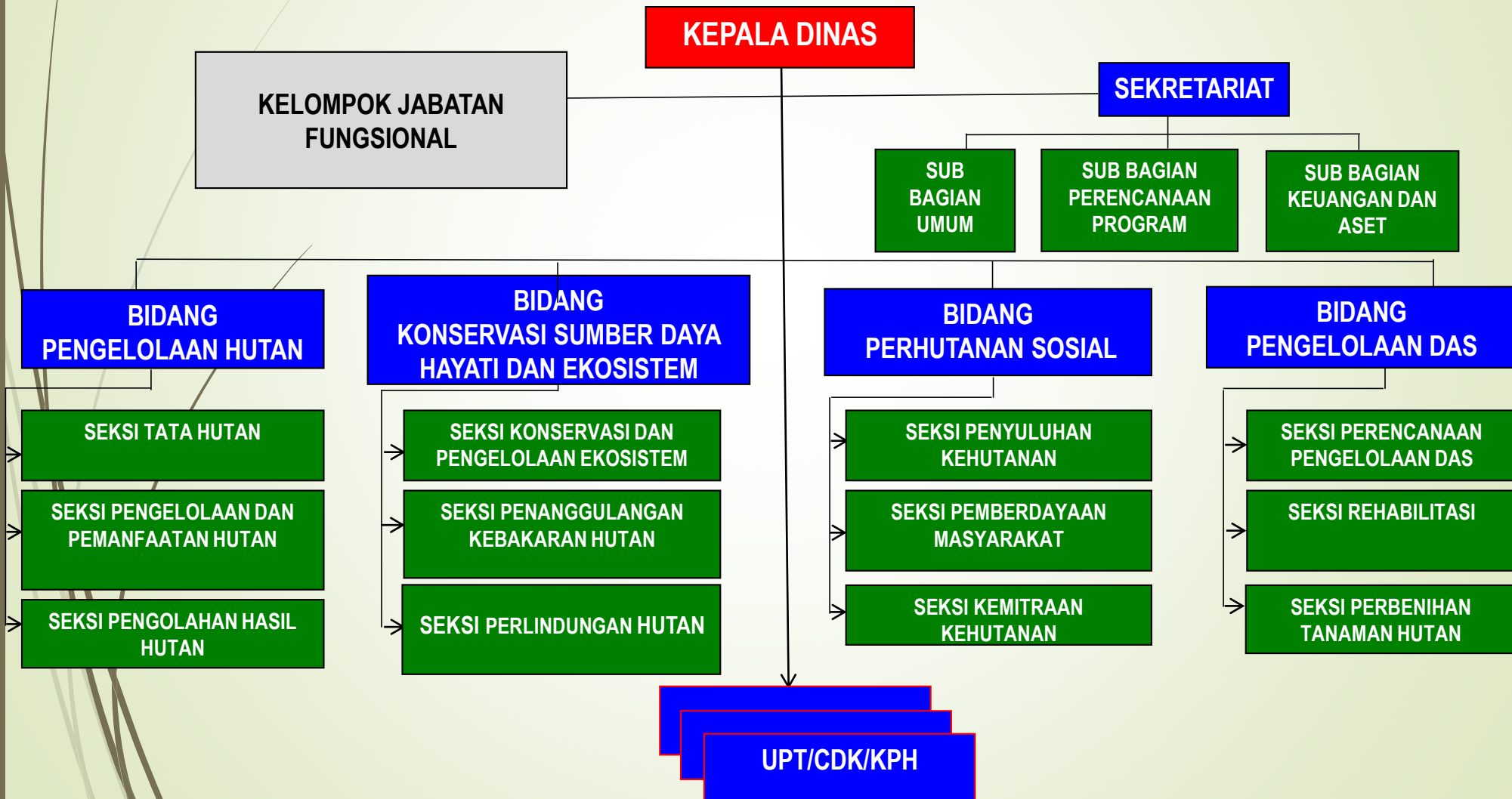
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU

Perizinan Kawasan Hutan	Jml Izin	Luas (Ha)
A. KAWASAN HUTAN	74	5,502,254.00
1. Izin Hutan Alam/RE	7	358,213.00
2. Izin Hutan Tanaman	59	1,692,960.00
a. Izin Menhut	49	1,602,106.00
b. Izin Bupati/Walikota	9	70,954.00
c. IUPHHK-HHBK	1	19,900.00
3. Pinjam Pakai Kaw.Hutan	8	367,729.97
a.Tahap Penetapan SK	8	5,325.39
b.Persetujuan Prinsip	10	14,275.82
c. KP	64	348,128.76
Jumlah Izin	74	2,418,902.97
Sisa Kawasan Hutan		3,083,351.03

Perizinan Kawasan Hutan	Jml Izin	Luas (Ha)
PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON HUTAN		
B. HPK/ ARAHAN PENGGUNAAN LAIN		2,252,072.00
1. Perkebunan	169	1,674,088.88
a. Sebelum Otonomi	152	1,607,066.64
=> Direbitkan Menhut	132	1,605,138.64
=> Direbitkan Kanwil	20	1,928.00
b. Setelah Otonomi	17	67,022.24
=> Direbitkan Menhut	6	67,022.24
2. Transmigrasi	11	40,342.85
Jumlah Pelepasan	180	1,714,431.73
C. HAK GUNA USAHA (HGU), 251 BIDANG		1,102,165.00
Sisa Pelepasan Yang Belum HGU		612,266.73
D. SISA KAWASAN HPK/APL (B - JUMLAH PELEPASAN)		537,640.27
E. NON KAWASAN HUTAN (PEMUKIMAN, DLL)		1,282,384.00

RANCANGAN KELEMBAGAAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU

(Berdasarkan kewenangan UU No. 23 Tahun 2014)



RANCANGAN DAN KEBUTUHAN PERSONEL PER KPHL/KPHP SE-PROVINSI RIAU

NO	KABUPATEN/KOTA UNIT	JENIS KPH	LUAS (Ha)	KEBUTUHAN PERSONIL
1	ROKAN HULU			
	A. UNIT XVI	KPHL	59.448,94	30
	B. UNIT XI	KPHP	30.333,83	30
	C. UNIT XIII	KPHP	93.455,56	38
	D. UNIT XIV	KPHP	66.104,46	30
2	ROKAN HILIR			
	A. UNIT I	KPHP	112.059,45	38
	B. UNIT II	KPHP	135.598,68	39
	C. UNIT XII	KPHP	183.239,53	40
3	KUANTAN SINGINGI			
	A. UNIT XXXI	KPHL	85.064,08	35
	B. UNIT XXXII	KPHP	89.234,28	37
4	DUMAI			
	A. UNIT III	KPHP	142.519,97	41
5	BENGKALIS			
	A. UNIT IV	KPHP	75.296,86	30
	B. UNIT V	KPHP	30.019,64	30
	C. UNIT VI	KPHP	224.731,85	40
	D. UNIT VIII	KPHP	110.266,22	38
6	SIAK			
	A. UNIT VII	KPHP	105.714,87	42
	B. UNIT XI	KPHP	140.561,99	40
	C. UNIT X	KPHP	64.833,70	31

NO	KABUPATEN/KOTA UNIT	JENIS KPH	LUAS (Ha)	KEBUTUHAN PERSONIL
7	KAMPAR			
	A. UNIT XV	KPHP	64.328,23	31
	B. UNIT XVII	KPHP	32.428,22	31
	C. UNIT XVIII	KPHP	143.782,97	31
	D. UNIT XIX	KPHP	96.006,28	31
8	PELALAWAN			
	A. UNIT XX	KPHP	169.215,18	39
	B. UNIT XXI	KPHP	115.143,44	41
9	KEP. MERANTI			
	A. UNIT XXIII	KPHP	72.422,53	31
	B. UNIT XXIV	KPHP	69.746,37	30
	C. UNIT XXV	KPHP	38.660,93	30
10	INDRAGIRI HILIR			
	A. UNIT XXVI	KPHP	90.157,81	38
	B. UNIT XXVII	KPHP	229.726,76	42
11	INDRAGIRI HULU			
	A. UNIT XXVIII	KPHP	62.987,08	31
	B. UNIT XXX	KPHP	155.534,64	38
12	SIAK - PELALAWAN			
	A. UNIT XXII	KPHP	503.623,42	44
13	INHIL - INHU			
	A. UNIT XXIX	KPHP	69.057,10	31
J U M L A H			3.661.304,9	1.128

HASIL PENDATAAN DAN INVENTARISASI P3D KEHUTANAN PROVINSI RIAU

NO	KAB./KOTA	PENYAMPAIAN DATA			
		PERSONEL	PENDANAAN	SARPRAS	DOKUMEN
1.	Kabupaten Siak	√	√	√	√
2.	Kabupaten Kampar	√	√	√	√
3.	Kabupaten Pelalawan	√			
4.	Kabupaten Rokan Hulu	√			
5.	Kabupaten Rokan Hilir	√	√	√	√
6.	Kabupaten Indragiri Hulu	√		√	√
7.	Kabupaten Indragiri Hilir	√	√	√	√
8.	Kab. Kuantan Singingi	√	√		
9.	Kota Dumai	√ (Polhut)			
10.	Kota Pekanbaru	√	√	√	√
11.	Kabupaten Bengkalis	-	-	-	-
12.	Kab. Kep. Meranti	-	-	-	-

REKAPITULASI PENYAMPAIAN DATA PNS

DINAS KAB/KOTA YANG MENANGANI KEHUTANAN

NO.	NAMA INSTANSI	GOLONGAN															JUMLAH
		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	
1.	DISTAN KOTA PEKANBARU	-	-	-	-	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	8
2.	DISHUTBUN SIAK	-	1	2	8	13	18	12	4	7	3	1	-	1	-	-	70
3.	DISHUT KAB. INHIL	1	2	2	15	11	10	7	7	7	3	2	-	1	-	-	68
4.	DISHUTBUN PELALAWAN	-	-	-	7	15	13	9	4	5	4	-	-	-	-	-	57
5.	DISHUT KAMPAR	-	3	-	16	20	32	14	2	7	3	1	-	-	-	-	98
6.	DISHUT ROHIL	1	2	2	12	9	6	15	1	-	14	13	2	-	-	-	77
7.	DISHUT INHU	1	-	5	11	18	10	5	4	11	7	1	-	-	-	-	73
8.	DISHUTBUN ROHUL	-	-	2	4	9	8	15	2	13	5	1	-	-	-	-	59
9.	DISTANBUNHUT DUMAI	-	-	1	3	5	8	5	-	2	4	-	-	-	-	-	28
10.	DISBUNHUT MERANTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.	DISHUT KUANSING	-	3	5	9	10	9	8	11	9	5	-	-	-	-	-	69
12.	DISHUTBUN BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
J U M L A H		3	11	19	85	111	118	91	37	61	48	19	2	2	0	0	607

KEBUTUHAN DATA P3D

No	Jenis Data	Peruntukan
1	Prosonel	Simulasi Gaji & Tunjangan
2	Pendanaan	Simulasi Kebutuhan Anggaran
3	Sarana Prasarana/Asset	Simulasi Biaya Operasional & Pemeliharaan
4	Dokumen (Perencanaan, Perijinan & Regulasi)	Simulasi kebutuhan Program & Kegiatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian



Sekian dan Terima Kasih

**Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kehutanan Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 468 Pekanbaru**

